

## INTISARI PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata cerdas (*smart tourism*) di Kota Yogyakarta melalui perspektif teori institusional. Meskipun konsep *smart tourism* telah banyak diteliti, mayoritas kajian masih berfokus pada aspek teknologi dan struktur kolaboratif tanpa menelaah peran regulatif, normatif, dan kultural-kognitif dalam membentuk tata kelola kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran, mekanisme, dan pola interaksi antar aktor pentahelix (pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media), mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kolaborasi, serta mengeksplorasi sejauh mana komponen teori institusional memengaruhi dinamika tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggabungkan wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi partisipatif terhadap berbagai forum kolaborasi *smart tourism* di Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan melalui teknik pengkodean bertingkat dan triangulasi sumber untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix berjalan dinamis namun belum terinstitusionalisasi secara penuh, bersifat ad-hoc, dan bergantung pada figur kepemimpinan maupun proyek tertentu. Pilar regulatif ditandai dengan dominasi pemerintah melalui kebijakan formal, tetapi minim instrumen koordinasi lintas sektor dan SOP kolaborasi. Pilar normatif lemah karena rendahnya nilai partisipasi, belum adanya standar etik kolaborasi, serta ketidakseimbangan peran antaraktor. Pilar kultural-kognitif juga terbatas, ditunjukkan oleh persepsi digitalisasi yang masih dianggap sebagai agenda *top-down* dan lemahnya proses pembelajaran bersama. Kondisi ini menimbulkan *institutional voids* pada aspek regulatif dan koordinatif. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman neo-institusionalisme dengan menekankan pentingnya integrasi antara regulasi, norma, dan budaya digital dalam tata kelola pariwisata cerdas. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan *smart tourism* tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi, tetapi juga kapasitas institusi lokal dalam mengoordinasikan aktor, membangun legitimasi normatif, serta menciptakan penerimaan kolektif terhadap inovasi digital.

**Kata Kunci:** Teori Institusional, Tata Kelola Kolaboratif, Pentahelix, *Smart Tourism*, Kota Yogyakarta

***ABSTRACT***

This study analyzes the dynamics of pentahelix collaboration in the development of smart tourism in Yogyakarta City through the perspective of institutional theory. Although the concept of smart tourism has been extensively researched, the majority of studies still focus on technological aspects and collaborative structures without examining the role of regulatory, normative, and cultural-cognitive in shaping collaborative governance. This research aims to understand the roles, mechanisms, and patterns of interaction between pentahelix actors (government, business, academia, community, and media), evaluate the strengths and weaknesses of collaboration, and explore the extent to which institutional theoretical components influence these dynamics. This research uses a qualitative approach with a case study design. This study combines in-depth interviews, policy document analysis, and participatory observation of various smart tourism collaboration forums in Yogyakarta City. Data analysis is carried out through multi-level coding techniques and source triangulation to guarantee validity. The results of the study show that pentahelix collaboration runs dynamically but has not been fully institutionalized, is ad-hoc, and depends on certain leadership figures and projects. The regulatory pillar is characterized by the dominance of the government through formal policies, but the lack of cross-sector coordination instruments and collaboration SOPs. The normative pillar is weak due to the low value of participation, the absence of ethical standards for collaboration, and the imbalance of roles between actors. The cultural-cognitive pillar is also limited, shown by the perception of digitalization that is still considered a top-down agenda and the weakness of the shared learning process. This condition creates institutional voids in the regulatory and coordinating aspects. Theoretically, this research expands the understanding of neo-institutionalism by emphasizing the importance of integration between regulations, norms, and digital culture in smart tourism governance. In practical terms, the research findings confirm that the success of smart tourism is not only determined by technological infrastructure, but also by the capacity of local institutions to coordinate actors, build normative legitimacy, and create collective acceptance of digital innovation.

***Keywords:*** Institutional Theory, Collaborative Governance, Pentahelix, Smart Tourism, Yogyakarta City